

NILAI MUSYAWARAH DALAM PKN SEBAGAI BASIS PEMBENTUKAN MODAL KULTURAL KOLEKTIF: SEBUAH TINJAUAN PUSTAKA TENTANG DEMOKRASI DELIBERATIF DI SEKOLAH

Yogi Setiawan¹, Zulfiani Ainur Rohmah²

Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia¹, Mtsn 2 Pasuruan

e-mail: yogisetiawan11@gmail.com

ABSTRAK

Pendidikan Kewarganegaraan memegang peran vital dalam membentuk karakter demokratis warga negara, namun realitas menunjukkan masih rendahnya partisipasi politik generasi muda dan adanya dominasi otoritas dalam praktik demokrasi di sekolah. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi nilai musyawarah dalam Pendidikan Kewarganegaraan sebagai basis pembentukan modal kultural kolektif guna mewujudkan demokrasi deliberatif di lingkungan pendidikan. Menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan, penelitian ini menganalisis berbagai literatur terkait tantangan demokrasi sekolah, internalisasi sila keempat Pancasila, serta hubungannya dengan teori sosiologi modern. Hasil kajian menunjukkan bahwa musyawarah berfungsi sebagai jembatan strategis antara nilai tradisi luhur dan kompetensi kewarganegaraan modern yang mampu menumbuhkan sikap kritis, empati, serta tanggung jawab sosial siswa. Kendati menghadapi tantangan teknis seperti dominasi siswa vokal dan keterbatasan waktu pembelajaran, fasilitasi guru yang inklusif terbukti mampu mengubah dinamika kelas menjadi ruang dialog yang lebih setara. Simpulan utama penelitian ini menegaskan bahwa pengintegrasian nilai musyawarah secara substantif dalam kurikulum tidak hanya efektif mengatasi defisit dialogis, tetapi juga memperkuat fondasi modal kultural kolektif yang esensial bagi keberlangsungan demokrasi deliberatif yang sehat dan partisipatif dalam sistem pendidikan nasional Indonesia.

Kata Kunci: *Musyawarah, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), Modal Kultural Kolektif, Demokrasi Deliberatif*

ABSTRACT

Civics Education plays a vital role in shaping the democratic character of citizens, yet reality shows low political participation among the younger generation and the dominance of authority in democratic practices in schools. This study aims to explore the value of deliberation in Civics Education as a basis for building collective cultural capital to realize deliberative democracy in educational settings. Using a descriptive qualitative method with a library research approach, this study analyzes various literature related to the challenges of school democracy, the internalization of the fourth principle of Pancasila, and its relationship to modern sociological theory. The results indicate that deliberation functions as a strategic bridge between noble traditional values and modern citizenship competencies, capable of fostering critical thinking, empathy, and social responsibility in students. Despite facing technical challenges such as the dominance of vocal students and limited learning time, inclusive teacher facilitation has proven effective in transforming classroom dynamics into a more equal space for dialogue. The main conclusion of this study confirms that substantively integrating the value of deliberation into the curriculum is not only effective in addressing the dialogic deficit but also strengthens the foundation of collective cultural capital, which is essential for the sustainability of a healthy and participatory deliberative democracy in Indonesia's national education system.

Keywords: *Deliberation, Civic Education (PKn), Collective Cultural Capital, Deliberative Democracy*

PENDAHULUAN

Pendidikan Kewarganegaraan memegang peranan yang sangat fundamental dan strategis dalam arsitektur sistem pendidikan nasional di Indonesia, berfungsi sebagai instrumen utama dalam pembentukan karakter bangsa (*nation and character building*) (Widiatmaka, 2021; Zulfikar & Dewi, 2021). Mata pelajaran ini tidak hanya dirancang untuk mentransfer pengetahuan mengenai ketatanegaraan, tetapi lebih jauh bertujuan untuk menanamkan kesadaran mendalam mengenai hak dan kewajiban setiap individu sebagai bagian dari entitas negara. Di tengah dinamika gelombang demokratisasi yang terus berkembang pasca era reformasi, urgensi pendidikan ini semakin terasa signifikan untuk mencetak warga negara yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga partisipatif dan demokratis. Landasan hukum pendidikan nasional secara implisit mengamanatkan bahwa tujuan akhir dari proses pembelajaran adalah melahirkan manusia yang beriman, berakhlak mulia, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab (Miftahusalimah et al., 2025; Toha et al., 2025). Oleh karena itu, kurikulum pendidikan kewarganegaraan harus mampu menerjemahkan mandat konstitusional tersebut menjadi praksis pendidikan yang relevan, memastikan bahwa setiap peserta didik memiliki kompetensi kewarganegaraan (*civic competence*) yang mumpuni untuk menjaga keutuhan dan kemajuan negara di masa depan.

Namun, terdapat kesenjangan yang cukup lebar antara cita-cita luhur regulasi pendidikan dengan realitas empiris yang terjadi di lapangan. Meskipun sistem pendidikan nasional telah menggariskan tujuan untuk membentuk masyarakat yang demokratis, fakta di lapangan menunjukkan bahwa *outcome* atau luaran dari proses pendidikan tersebut belum sepenuhnya optimal. Hal ini tecermin dari masih rendahnya kesadaran partisipatif di kalangan generasi muda, khususnya para lulusan sekolah menengah (Simangunsong & Habeahan, 2025; Tawakal & Purnomo, 2025). Data statistik mengenai partisipasi politik kaum muda dalam pesta demokrasi, seperti pemilihan umum, menunjukkan angka yang memprihatinkan. Fenomena rendahnya keterlibatan generasi milenial dalam memberikan hak suaranya mengindikasikan adanya diskoneksi antara teori demokrasi yang diajarkan di ruang kelas dengan implementasi nyata dalam kehidupan bernegara. Kondisi ini menjadi sinyal peringatan bahwa pendidikan kewarganegaraan harus segera dibenahi dan ditingkatkan kualitasnya. Pendidikan ini harus bertransformasi menjadi basis pembentukan identitas kewarganegaraan yang inklusif, di mana siswa tidak hanya diajarkan tentang prosedur teknis pemilu, tetapi juga nilai-nilai substansial mengenai pentingnya suara mereka dalam menentukan arah masa depan bangsa (Susanto et al., 2025; Yulianie et al., 2025; Yunus et al., 2021).

Tantangan dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi tidak hanya datang dari faktor eksternal, tetapi juga berakar kuat pada ekosistem internal sekolah itu sendiri. Institusi pendidikan yang seharusnya menjadi laboratorium demokrasi bagi siswa, sering kali justru terjebak dalam praktik-praktik yang kontra-produktif. Di lingkungan sekolah, kerap terjadi dominasi kekuasaan yang berpusat pada figur otoritas, seperti guru dan kepala sekolah, yang memegang kendali penuh atas pengambilan keputusan. Pola hubungan yang hierarkis dan feodalistik ini mengakibatkan ruang gerak siswa untuk berekspresi dan berpendapat menjadi sangat terbatas. Akibatnya, proses pembelajaran di kelas cenderung bersifat satu arah atau monologis, di mana guru bertindak sebagai sumber kebenaran tunggal dan siswa hanya diposisikan sebagai objek pasif penerima informasi. Situasi ini menghambat tumbuh kembangnya nalar kritis dan keberanian siswa untuk berpartisipasi dalam diskursus publik. Padahal, pendidikan demokrasi yang efektif mensyaratkan adanya ruang dialog yang egalitar, di mana setiap argumen dihargai dan diuji secara rasional tanpa adanya intimidasi atau paksaan dari pihak manapun (Hadinata, 2022; Maksum et al., 2020; Yuniarto, 2020).

Permasalahan di lingkungan pendidikan ini semakin diperparah oleh tantangan budaya yang lebih luas di tengah masyarakat. Budaya patriarki yang masih mengakar kuat di sebagian besar wilayah Indonesia turut memengaruhi pola interaksi di sekolah, di mana kepatuhan mutlak sering kali lebih dihargai daripada sikap kritis. Selain itu, arus globalisasi yang membawa serta nilai-nilai individualisme mulai menggerus semangat kebersamaan dan kepedulian sosial di kalangan pelajar. Survei dan pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil sekolah yang benar-benar menerapkan model pengambilan keputusan yang inklusif dan partisipatif. Mayoritas institusi pendidikan masih bergantung pada hierarki tradisional yang kaku, yang pada akhirnya melemahkan fondasi demokrasi deliberatif. Jika sekolah sebagai mikrokosmos masyarakat gagal mencontohkan praktik demokrasi yang sehat, maka sulit diharapkan akan lahir generasi penerus yang mampu mencegah terjadinya polarisasi sosial dan konflik horizontal di tengah keberagaman bangsa Indonesia yang sangat kompleks.

Untuk mengatasi degradasi nilai-nilai demokrasi tersebut, diperlukan upaya revitalisasi kearifan lokal yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia, yaitu musyawarah. Musyawarah untuk mencapai mufakat bukan sekadar prosedur pengambilan keputusan, melainkan sebuah nilai luhur yang telah membudaya sejak zaman nenek moyang dan menjadi identitas asli masyarakat Nusantara. Para pendiri bangsa (*founding fathers*) menyadari sepenuhnya bahwa di tengah pluralitas suku, agama, dan budaya, musyawarah adalah jalan terbaik untuk memecahkan masalah dan merajut persatuan. Nilai ini kemudian dikristalisasi dalam sila keempat Pancasila, yang menekankan pada hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Musyawarah sejatinya adalah antitesis dari demokrasi liberal yang berbasis pada prinsip *winner takes all* atau tirani mayoritas. Dalam musyawarah, setiap suara didengar dan dipertimbangkan untuk mencapai konsensus bersama yang berkeadilan. Sayangnya, di era digital yang serba cepat dan kompetitif saat ini, nilai-nilai musyawarah sering kali terpinggirkan oleh model demokrasi prosedural yang dangkal, sehingga perlu dihidupkan kembali sebagai *living values* dalam pendidikan.

Dalam upaya menghidupkan kembali nilai musyawarah dalam konteks pendidikan modern, diperlukan landasan teoretis yang kokoh yang mampu menjembatani tradisi masa lalu dengan tuntutan masa kini. Di sinilah letak pentingnya mengintegrasikan konsep sosiologis modern, khususnya modal kultural kolektif (*collective cultural capital*), ke dalam praksis pendidikan kewarganegaraan. Modal kultural kolektif merujuk pada kekayaan sumber daya budaya, norma, dan nilai-nilai kebersamaan yang dimiliki oleh suatu kelompok masyarakat, yang jika dikelola dengan baik dapat dikonversi menjadi kekuatan sosial yang dahsyat. Konsep ini sangat relevan jika dikaitkan dengan prinsip musyawarah, di mana gotong royong dan dialog menjadi modal utama. Selain itu, kajian ini juga perlu dihubungkan dengan teori politik kontemporer mengenai demokrasi deliberatif. Dalam pandangan ini, legitimasi sebuah keputusan politik tidak ditentukan oleh jumlah suara terbanyak, melainkan oleh kualitas argumentasi dan rasionalitas dalam proses diskusi yang bebas dari dominasi, sejalan dengan semangat musyawarah mufakat.

Oleh karena itu, tulisan ini hadir untuk menawarkan sebuah perspektif baru dan inovatif dalam pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan sintesis mendalam yang mengaitkan nilai normatif Pancasila, khususnya musyawarah, dengan kerangka kerja sosiologis modal kultural dan teori politik demokrasi deliberatif. Kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada upaya menjembatani ketiga elemen tersebut—nilai tradisional, modal sosial, dan teori demokrasi modern—untuk membangun landasan konseptual bagi reformasi pendidikan. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan formulasi strategi pembelajaran yang mampu mengubah ruang kelas menjadi arena deliberasi yang sesungguhnya. Tujuannya adalah agar demokrasi tidak lagi dipahami sebagai konsep abstrak atau sekadar ritual elektoral lima tahunan, melainkan sebagai

sebuah *way of life* atau cara hidup yang terinternalisasi dalam diri setiap siswa. Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan dapat benar-benar berfungsi sebagai inkubator bagi lahirnya warga negara yang cerdas, partisipatif, dan memiliki komitmen kuat terhadap nilai-nilai kebangsaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan desain penelitian kualitatif dengan sifat deskriptif yang dilaksanakan melalui pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Pemilihan metode kualitatif deskriptif didasarkan pada tujuan utama penelitian yang berupaya untuk mengeksplorasi dan memahami secara mendalam fenomena sosial yang kompleks, yaitu degradasi nilai demokrasi di sekolah dan urgensi revitalisasi nilai *musyawarah* dalam konteks pendidikan modern. Pendekatan ini tidak melibatkan pengumpulan data numerik atau statistik dari lapangan, melainkan berfokus pada interpretasi makna, konsep, dan definisi yang terkandung dalam berbagai literatur akademik. Melalui studi kepustakaan, peneliti menelusuri, membaca, dan menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan untuk membangun kerangka konseptual yang kokoh mengenai integrasi nilai tradisi lokal dengan teori sosiologi modern. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menjembatani kesenjangan teoretis antara nilai luhur Pancasila, khususnya sila keempat, dengan konsep *modal kultural kolektif* dan *demokrasi deliberatif* tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu sebagaimana penelitian lapangan. Dengan demikian, metode ini sangat memadai untuk menjawab rumusan masalah yang bersifat teoretis-konseptual mengenai penguatan karakter kewarganegaraan siswa.

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan menghimpun data sekunder dari berbagai sumber otoritatif yang kredibel dan relevan dengan topik kajian. Sumber data utama meliputi buku-buku teks tentang filsafat Pancasila, jurnal ilmiah nasional maupun internasional yang membahas sosiologi pendidikan dan politik, serta dokumen regulasi pemerintah terkait kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan. Selain itu, peneliti juga mengumpulkan artikel-artikel hasil penelitian terdahulu yang mengulas tantangan praktik demokrasi di lingkungan sekolah serta strategi internalisasi nilai *civic competence*. Proses pencarian literatur dilakukan dengan memanfaatkan basis data akademik digital dan perpustakaan, menggunakan kata kunci spesifik seperti "demokrasi deliberatif", "pendidikan karakter", dan "modal sosial". Data yang terkumpul kemudian diseleksi berdasarkan kriteria relevansi, kemutakhiran (*recency*), dan validitas isinya untuk memastikan bahwa informasi yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pengumpulan data ini tidak hanya sekadar menyalin kutipan, tetapi melibatkan proses identifikasi dan klasifikasi tema-tema sentral yang berkaitan dengan hambatan teknis musyawarah di kelas, peran guru sebagai fasilitator, serta dampak psikologis dan sosial dari penerapan metode diskusi partisipatif terhadap siswa.

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri (*human instrument*) yang berperan aktif dalam merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data kepustakaan yang diperoleh. Alat bantu yang digunakan meliputi lembar catatan atau matriks analisis untuk mengorganisir informasi dari berbagai literatur. Teknik analisis data dilakukan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) dan analisis wacana kritis. Tahapan analisis dimulai dengan reduksi data, di mana peneliti memilah informasi yang esensial dan membuang yang tidak relevan, kemudian dilanjutkan dengan penyajian data secara sistematis untuk melihat keterkaitan antar konsep. Peneliti melakukan sintesis antara pandangan tradisional mengenai musyawarah dengan teori modern tentang *civic disposition* untuk menemukan pola hubungan yang konstruktif. Proses ini melibatkan interpretasi mendalam untuk memaknai bagaimana nilai musyawarah dapat dikonversi menjadi modal kultural bagi siswa. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, di mana peneliti merumuskan proposisi baru

mengenai strategi pembelajaran berbasis musyawarah yang efektif untuk mewujudkan iklim demokrasi yang sehat di sekolah. Validitas hasil analisis dijaga melalui ketekunan pengamatan pustaka dan referensi silang antar sumber untuk menjamin konsistensi temuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Nilai Filosofis Musyawarah dalam Pendidikan Kewarganegaraan

Musyawarah merupakan representasi nilai-nilai tradisi luhur yang telah mengakar kuat dalam kehidupan sosiologis masyarakat Indonesia, sehingga sangat beralasan apabila para pendiri bangsa menetakannya sebagai elemen fundamental dalam Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila bukanlah ideologi yang turun dari langit, melainkan cerminan dari kebiasaan-kebiasaan otentik yang hidup di tengah rakyat, yang kemudian dikristalisasi menjadi falsafah hidup berbangsa. Dalam konteks keberagaman etnis di nusantara, mekanisme musyawarah selalu menjadi pilihan utama untuk menyelesaikan berbagai sengketa dan merumuskan keputusan bersama. Hal ini menunjukkan bahwa kearifan lokal tersebut memiliki daya ikat sosial yang kuat (Islamy, 2022). Oleh karena itu, integrasi nilai musyawarah dalam pendidikan kewarganegaraan bukan hanya sekadar transfer pengetahuan sejarah, melainkan upaya pewarisan budaya politik yang santun dan bermartabat. Pendidikan kewarganegaraan berfungsi sebagai wahana strategis untuk menanamkan kembali kesadaran bahwa identitas bangsa Indonesia dibangun di atas fondasi kebersamaan dan dialog, bukan pemaksaan kehendak satu golongan terhadap golongan lainnya (Dewi et al., 2021; Nanggala, 2020).

Sila keempat Pancasila yang berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan” mengandung makna filosofis yang sangat mendalam mengenai konsep demokrasi khas Indonesia. Esensi dari sila ini bukanlah demokrasi yang hanya mengandalkan mekanisme suara terbanyak atau voting semata, melainkan demokrasi yang mengutamakan pencapaian mufakat melalui proses deliberasi yang bijaksana. Prinsip kerakyatan di sini mengandung arti rasa cinta terhadap rakyat dan perjuangan untuk kepentingan orang banyak, yang dijalankan melalui lembaga-lembaga perwakilan yang amanah. Pemusyawaratan menuntut adanya proses diskursus yang sehat, di mana setiap keputusan diambil berdasarkan akal sehat, kejujuran kolektif, dan pertanggungjawaban moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan harus mampu menerjemahkan konsep hikmat kebijaksanaan ini ke dalam praktik pembelajaran, sehingga siswa memahami bahwa demokrasi bukan kebebasan tanpa batas, melainkan kebebasan yang bertanggung jawab demi kemaslahatan bersama (Pangalila, 2019; Sugiarto, 2020).

Dalam kerangka tujuan pembelajaran, pendidikan kewarganegaraan difokuskan pada upaya membentuk warga negara yang memiliki kompetensi ideal secara holistik. Kompetensi ini mencakup tiga dimensi utama, yaitu pengetahuan kewarganegaraan, keterampilan kewarganegaraan, dan watak kewarganegaraan yang demokratis. Pengetahuan kewarganegaraan berkaitan dengan pemahaman intelektual mengenai sistem politik, hak, dan kewajiban. Keterampilan kewarganegaraan menyangkut kemampuan partisipatif untuk terlibat dalam kehidupan publik. Sedangkan watak kewarganegaraan adalah karakter privat dan publik yang esensial untuk memelihara keberlangsungan demokrasi itu sendiri. Watak ini tidak terbentuk secara instan, melainkan tumbuh melalui proses pembiasaan dan pengalaman nyata di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pengalaman bermusyawarah di sekolah menjadi sarana vital untuk membangkitkan kesadaran siswa bahwa kehidupan demokrasi memerlukan individu-individu yang mandiri, toleran, dan mampu memikul tanggung jawab atas setiap keputusan yang diambil secara kolektif (Tuhuteru, 2023).

2. Musyawarah sebagai Modal Sosial dalam Demokrasi Sekolah

Penerapan metode musyawarah dalam ekosistem pembelajaran di sekolah terbukti efektif dalam membentuk peserta didik yang lebih demokratis dan memiliki rasa hormat terhadap kesepakatan kolektif. Melalui praktik ini, siswa tidak hanya diajarkan teori demokrasi, tetapi dilatih secara langsung untuk mengartikulasikan gagasan, menjadi pendengar yang aktif, serta menghargai keragaman perspektif yang muncul dalam diskusi. Proses dialektika yang terjadi selama musyawarah melatih nalar kritis siswa dalam membedah masalah sekaligus mengasah kepekaan empati mereka terhadap perasaan orang lain. Hal ini sangat selaras dengan nilai-nilai Pancasila yang menempatkan konsensus sebagai basis pengambilan keputusan. Ketika siswa terbiasa dengan iklim dialogis sejak dini, mereka akan tumbuh menjadi individu yang tidak mudah memaksakan kehendak dan lebih mengutamakan solusi damai dalam menghadapi konflik. Kemampuan ini merupakan modal sosial yang sangat berharga untuk menciptakan interaksi sosial yang harmonis dan minim gesekan di tengah masyarakat yang majemuk (P et al., 2024).

Namun, dalam realitas pelaksanaannya, upaya membangun kultur demokrasi melalui musyawarah di sekolah sering kali dihadapkan pada dinamika interaksi yang tidak seimbang. Salah satu tantangan yang kerap muncul adalah dominasi ruang bicara oleh siswa yang memiliki kepercayaan diri tinggi atau kemampuan verbal yang lebih baik, yang secara tidak sadar dapat memarginalkan partisipasi siswa yang cenderung introvert atau pemalu. Ketimpangan partisipasi ini dapat menyebabkan reduksi terhadap keragaman sudut pandang, sehingga keputusan yang dihasilkan menjadi kurang representatif dan hanya mewakili kepentingan kelompok dominan. Oleh karena itu, peran guru sebagai fasilitator menjadi sangat krusial dalam menciptakan atmosfer kelas yang inklusif. Guru harus mampu menjamin distribusi kesempatan bicara yang adil, sehingga setiap siswa merasa aman dan dihargai untuk menyuarakan pendapatnya tanpa rasa takut akan intimidasi atau penghakiman dari teman sebayanya (Inah, 2015; Yaylaci & Beauvais, 2017).

Untuk mengatasi ketimpangan tersebut, diperlukan teknik moderasi dan fasilitasi pembelajaran yang terencana dan sistematis. Guru perlu menerapkan strategi pengelolaan diskusi yang memastikan bahwa proses pertukaran gagasan berjalan dua arah dan substantif, bukan sekadar debat kusir. Dengan pengelolaan yang baik, keputusan yang lahir dari rahim musyawarah akan benar-benar berorientasi pada kepentingan bersama, bukan kepentingan individu atau kelompok tertentu. Lebih jauh lagi, musyawarah di sekolah berfungsi sebagai instrumen pendidikan karakter yang ampuh. Melalui keterlibatan aktif dalam proses ini, siswa menyerap nilai-nilai luhur seperti gotong royong, keadilan, dan solidaritas sosial. Mereka belajar bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, ego pribadi harus sering kali diredam demi tercapainya kebaikan komunal. Partisipasi ini memberikan pemahaman mendalam tentang urgensi kerja sama, yang pada akhirnya membentuk karakter siswa yang berintegritas, bermoral, dan memiliki kesadaran sosial yang tinggi (Masnawati et al., 2023).

3. Pembentukan Karakter Siswa Melalui Praktik Musyawarah

Musyawarah yang diintegrasikan dalam proses belajar mengajar memberikan dampak positif yang signifikan bagi perkembangan siswa, baik dari aspek kognitif maupun kematangan sosial. Pendekatan ini sangat fleksibel dan dapat diaplikasikan dalam berbagai konteks, mulai dari diskusi materi pelajaran, perencanaan kegiatan kelas, hingga pemilihan struktur organisasi kelas. Dalam situasi-situasi tersebut, musyawarah menjadi laboratorium nyata untuk mengasah keterampilan komunikasi interpersonal siswa. Kemampuan untuk menyampaikan ide secara runtut, jelas, dan persuasif, serta kemampuan untuk menyimak argumen orang lain dengan penuh perhatian, merupakan keterampilan lunak yang sangat vital dalam kehidupan modern (Amin et al., 2024). Tanpa kemampuan komunikasi yang baik, kesalahpahaman mudah terjadi dan konflik sulit dihindari. Oleh karena itu, pembiasaan musyawarah di sekolah secara tidak

langsung mempersiapkan siswa untuk menjadi komunikator yang efektif dan negosiator yang ulung di masa depan.

Selain aspek komunikasi, musyawarah juga menanamkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab yang kuat terhadap setiap keputusan yang diambil. Ketika siswa dilibatkan secara aktif dalam proses penentuan tujuan atau aturan main, mereka merasa memiliki andil dan kontribusi nyata terhadap hasil akhirnya. Perasaan dihargai ini mendorong mereka untuk lebih berkomitmen dalam menjalankan apa yang telah disepakati bersama, karena mereka menganggap keputusan tersebut sebagai produk dari pemikiran mereka sendiri, bukan instruksi satu arah dari guru (Geurts et al., 2023). Dengan demikian, siswa belajar untuk memikul tanggung jawab atas peran mereka dalam kolektifitas dan menghargai konsekuensi dari setiap pilihan yang dibuat. Keterlibatan aktif ini secara bertahap meningkatkan partisipasi siswa dalam berbagai aktivitas sekolah lainnya, menciptakan lingkungan belajar yang dinamis di mana siswa tidak lagi menjadi objek pasif, melainkan subjek aktif yang berdaya.

Lebih dalam lagi, praktik musyawarah mengajarkan nilai-nilai etika sosial yang fundamental seperti kejujuran, transparansi, dan integritas moral. Dalam forum musyawarah, siswa didorong untuk bersikap terbuka mengenai pandangan mereka, menghormati perbedaan pendapat, dan berkolaborasi secara sehat untuk mencapai titik temu. Mereka dimotivasi untuk menyuarakan kebenaran dan aspirasi mereka secara jujur tanpa rasa takut, yang merupakan esensi dari kebebasan berekspresi yang bertanggung jawab (Munir & Ilham, 2022). Proses ini menumbuhkan semangat kolaborasi dan mengikis sikap egois, karena siswa diajarkan untuk tidak hanya memikirkan keuntungan pribadi, tetapi juga kesejahteraan kelompok secara keseluruhan. Mereka berlatih menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan bersama, sebuah keterampilan yang mencerminkan jiwa gotong royong. Dengan demikian, musyawarah menjadi sarana efektif untuk internalisasi karakter luhur yang sangat dibutuhkan untuk menjaga kohesi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

4. Tantangan Struktural dan Kultural dalam Implementasi

Penerapan musyawarah dalam lingkungan pendidikan, meskipun memiliki tujuan mulia, tidak lepas dari berbagai hambatan praktis yang bersifat struktural maupun kultural. Tantangan yang paling sering ditemui adalah adanya dominasi suara dari segelintir siswa yang memiliki kepercayaan diri berlebih atau status sosial yang lebih menonjol di dalam kelas. Siswa-siswa vokal ini cenderung mengendalikan arah pembicaraan dan memonopoli waktu diskusi, yang pada akhirnya menghambat munculnya gagasan dari siswa lain yang lebih pendiam atau kurang asertif. Fenomena ini menciptakan ketidakseimbangan kekuasaan dalam forum kelas, di mana keputusan yang diambil sering kali bias dan tidak mencerminkan konsensus yang sesungguhnya. Jika kondisi ini dibiarkan terus-menerus tanpa intervensi, esensi demokrasi dalam musyawarah akan tergerus, dan siswa pasif akan merasa bahwa suara mereka tidak berharga atau tidak didengar (Suhartono, 2019, 2021).

Selain masalah dominasi personal, kendala teknis berupa keterbatasan alokasi waktu pembelajaran juga menjadi penghalang utama efektivitas musyawarah. Kurikulum yang padat sering kali memaksa guru untuk mempercepat proses diskusi, sehingga musyawarah berjalan secara dangkal dan terburu-buru. Padahal, sebuah proses deliberasi yang ideal membutuhkan ruang waktu yang memadai agar setiap argumen dapat diuji, setiap perspektif dapat digali, dan setiap siswa memiliki kesempatan untuk berpikir kritis sebelum mengambil keputusan. Musyawarah yang dipaksakan selesai dalam waktu singkat cenderung menghasilkan keputusan yang prematur dan tidak matang, karena tidak mengakomodasi analisis masalah yang mendalam. Akibatnya, siswa kehilangan kesempatan untuk belajar tentang kompleksitas pengambilan keputusan dan cenderung menganggap musyawarah hanya sebagai formalitas

administratif belaka untuk memenuhi tuntutan tugas sekolah (Fadli et al., 2025; Nailinda et al., 2025).

Tantangan selanjutnya berkaitan dengan kapasitas guru dan latar belakang siswa yang beragam. Tidak semua pendidik memiliki keterampilan fasilitasi yang mumpuni untuk mengelola dinamika diskusi yang kompleks. Guru yang kurang terlatih mungkin kesulitan menengahi konflik, meratakan partisipasi, atau mengarahkan diskusi agar tetap fokus pada tujuan. Tanpa fasilitasi yang kompeten, perbedaan latar belakang pengalaman, sosial, dan budaya yang dibawa oleh masing-masing siswa dapat memicu gesekan yang tidak produktif alih-alih memperkaya perspektif. Selain itu, banyak siswa yang belum memahami filosofi dasar musyawarah karena terbiasa dengan pola asuh atau budaya otoriter di lingkungan luar sekolah. Ketidapahaman ini membuat mereka bingung mengenai tujuan diskusi, sehingga partisipasi mereka menjadi minim atau tidak terarah. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai tujuan dan nilai musyawarah menjadi prasyarat mutlak yang sering kali terabaikan (Santhi et al., 2025; Simangunsong & Habeahan, 2025).

5. Strategi Penguatan dan Solusi Hambatan Pembelajaran

Untuk mengatasi berbagai hambatan yang muncul dalam penerapan musyawarah, diperlukan strategi intervensi yang berfokus pada peningkatan kompetensi fasilitasi guru dan penciptaan iklim kelas yang inklusif. Guru perlu dibekali dengan pelatihan khusus mengenai teknik-teknik moderasi diskusi yang efektif, seperti metode diskusi kelompok kecil atau teknik berpikir berpasangan, yang dapat mengurangi kecemasan sosial pada siswa pemalu. Dengan memecah kelas menjadi kelompok-kelompok kecil, dominasi siswa vokal dapat diredam dan ruang partisipasi bagi siswa pasif menjadi lebih luas. Selain itu, guru harus proaktif dalam mengatur lalu lintas pembicaraan, memberikan giliran bicara secara merata, dan menegaskan aturan main bahwa setiap pendapat adalah berharga. Pendekatan yang lebih terstruktur ini akan membantu menyeimbangkan dinamika kekuatan di dalam kelas, sehingga keputusan yang dihasilkan benar-benar merupakan representasi dari aspirasi kolektif seluruh siswa.

Manajemen waktu dan kejelasan tujuan juga menjadi kunci keberhasilan implementasi musyawarah di tengah padatnya jadwal akademik. Guru perlu merancang skenario pembelajaran yang efisien, di mana waktu untuk diskusi dialokasikan secara proporsional dengan bobot masalah yang dibahas. Lebih dari itu, sebelum memulai proses musyawarah, sangat penting bagi pendidik untuk memberikan pengantar yang jelas mengenai urgensi dan tujuan dari kegiatan tersebut. Siswa perlu dipahami bahwa musyawarah bukan sekadar aktivitas berbicara, melainkan proses belajar hidup bersama, menghargai perbedaan, dan mencari solusi terbaik bagi semua pihak. Ketika siswa memahami konteks dan manfaat jangka panjang dari musyawarah, motivasi intrinsik mereka untuk terlibat aktif akan meningkat. Pemahaman ini mengubah persepsi mereka dari sekadar menjalankan tugas menjadi sebuah kesadaran untuk berkontribusi dalam komunitas kelas.

Pada akhirnya, musyawarah harus didudukkan kembali sebagai instrumen strategis untuk penguatan pendidikan karakter yang berlandaskan Pancasila. Strategi pembelajaran harus diarahkan pada internalisasi nilai-nilai luhur seperti demokrasi, keadilan sosial, dan gotong royong. Melalui proses yang terbimbing, siswa dilatih untuk menerima perbedaan pendapat secara rasional, mengelola emosi ketika gagasannya ditolak, dan mendukung keputusan bersama dengan lapang dada. Hal ini selaras dengan tujuan pendidikan nasional untuk mencetak generasi yang cerdas secara intelektual dan anggun secara moral. Dengan mengatasi hambatan teknis dan kultural, musyawarah dapat bertransformasi menjadi wahana yang ampuh untuk menanamkan tanggung jawab sosial, di mana siswa menyadari bahwa partisipasi mereka menentukan kualitas kehidupan bersama. Pendidikan karakter melalui musyawarah inilah yang

akan melahirkan warga negara yang memiliki integritas dan komitmen kuat terhadap persatuan bangsa.

KESIMPULAN

Musyawarah merupakan pendekatan efektif untuk membentuk sikap menghormati hasil kesepakatan bersama serta memperkuat pembentukan karakter siswa yang berlandaskan Pancasila. Melalui musyawarah, siswa diajarkan untuk tidak hanya mengemukakan gagasan pribadi, melainkan juga mendengarkan dan menghargai pandangan rekan mereka. Hal ini sangat sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan kehidupan bermasyarakat yang tercermin dalam Pancasila, termasuk semangat gotong royong, keadilan sosial, serta rasa kebersamaan.

Pelaksanaan musyawarah memungkinkan siswa menyerap nilai-nilai tersebut secara mendalam, sekaligus melatih mereka dalam menyikapi perbedaan opini dengan bijak serta merumuskan keputusan kolektif yang mungkin bertentangan dengan preferensi individu. Meskipun demikian, penerapannya di kelas sering menghadapi kendala seperti keterbatasan durasi pelajaran dan kecenderungan siswa yang lebih vokal mendominasi diskusi. Untuk mengatasinya, diperlukan strategi pendampingan yang merata dan inklusif. Guru pun perlu dilatih dalam memoderasi perdebatan secara tepat, sehingga setiap siswa merasa dihargai dan termotivasi untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses tersebut.

Lebih jauh lagi, musyawarah mendorong siswa untuk merasa lebih bertanggung jawab atas keputusan yang dihasilkan oleh kelompok, yang sejalan dengan visi pendidikan nasional untuk mencetak generasi muda yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas moral dan kejujuran. Pada intinya, musyawarah bukan sekadar alat untuk mencapai konsensus dalam pengambilan keputusan, melainkan elemen krusial dalam membentuk watak demokratis pada siswa. Apabila diterapkan dengan baik, musyawarah dapat menanamkan prinsip-prinsip Pancasila, seperti penghormatan terhadap hak dan kewajiban masing-masing individu, serta membentuk ruang belajar yang inklusif dan penuh keterlibatan. Dengan demikian, musyawarah memainkan peran strategis dalam membentuk generasi muda yang berpengetahuan, beretika, dan penuh rasa tanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, A., Adiansyah, R., Mustami, M. K., Yani, A., Hujjatusnaini, N., & Ahmed, M. A. (2024). The influence of WE-ARe (Warm-Up, Exploring, Argumentation, Resume) model integrated with 21st-century skills on prospective biology teachers' communication skills. *Jurnal Pendidikan IPA Indonesia*, 13(1), 12. <https://doi.org/10.15294/jpii.v13i1.47911>
- Dewi, D. A., Hamid, S. I., Asyari, D., Setiawati, R., & Istiqomah, Y. Y. (2021). Implementasi pendidikan kewarganegaraan untuk mewujudkan identitas dan integritasi nasional. *Jurnal Basicedu*, 5(6), 5221. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v5i6.1607>
- Fadli, M., Kurniawan, M. U., & Wijaya, S. A. (2025). Analisis implementasi Kurikulum Merdeka di Madrasah Aliyah Darun Najah: Studi kasus keselarasan pendidikan IPS (Ekonomi) dengan nilai-nilai agama. *Social: Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 5(2). <https://doi.org/10.51878/social.v5i2.6192>
- Geurts, E. M. A., Reijts, R. P., Leenders, H. H. M., Jansen, M., & Hoebe, C. J. P. A. (2023). Co-creation and decision-making with students about teaching and learning: A systematic literature review. *Journal of Educational Change*, 25(1), 103. <https://doi.org/10.1007/s10833-023-09481-x>

- Hadinata, F. (2022). Analisis filosofis implementasi Merdeka Belajar sebagai instrumen kesetaraan dan pendidikan demokratis. *Mozaik Humaniora*, 21(2), 158. <https://doi.org/10.20473/mozaik.v21i2.29695>
- Inah, E. N. (2015). Peran komunikasi dalam interaksi guru dan siswa. *Al-Ta'dib: Jurnal Kajian Ilmu Kependidikan*, 8(2), 150. <https://doi.org/10.31332/atdb.v8i2.416>
- Islamy, A. (2022). Moderasi beragama dalam ideologi Pancasila. *Poros Onim: Jurnal Sosial Keagamaan*, 3(1), 18. <https://doi.org/10.53491/porosonim.v3i1.333>
- Maksum, M. N. R., Asy'arie, M., & Aly, A. (2020). Democracy education through the development of pesantren culture. *Humanities & Social Sciences Reviews*, 8(4), 10. <https://doi.org/10.18510/hssr.2020.842>
- Masnawati, E., Darmawan, D., & Masfufah, M. (2023). Peran ekstrakurikuler dalam membentuk karakter siswa. *PPIMAN: Pusat Publikasi Ilmu Manajemen*, 1(4), 305. <https://doi.org/10.59603/ppiman.v1i4.347>
- Miftahusalimah, P. L., Yulizah, Y., Rosmalina, E., Sari, F., & Samitra, D. (2025). Disiplin positif pada implementasi Kurikulum Merdeka sebagai strategi dalam menumbuhkan karakter disiplin peserta didik. *Learning: Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran*, 5(1), 209. <https://doi.org/10.51878/learning.v5i1.4331>
- Munir, S., & Ilham, L. (2022). Adjustments to Community Organization Law: Implications for freedom of association, assembly, and expression. *Constitutionale*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.25041/constitutionale.v3i1.2507>
- Nailinda, V., Alim, J. A., & Sekarwinahyu, M. (2025). Implementasi pembelajaran STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) terhadap keterampilan berpikir kritis siswa sekolah dasar. *Science: Jurnal Inovasi Pendidikan Matematika dan IPA*, 5(1), 363. <https://doi.org/10.51878/science.v5i1.4700>
- Nanggala, A. (2020). Pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan multikultural. *Jurnal Soshum Insentif*, 3(2), 197. <https://doi.org/10.36787/jsi.v3i2.354>
- P., M., Syakur, A., & Solikhah, N. A. (2024). Conflict management strategies for early childhood educators: An empirical perspective. *Journal Corner of Education Linguistics and Literature*, 4(1), 222. <https://doi.org/10.54012/jcell.v4i001.383>
- Pangalila, T. (2019). Interaksi sosial guru dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMA Katolik Karitas. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 16(2), 137. <https://doi.org/10.21831/jc.v16i2.23326>
- Santhi, P. A. S., Sadtyadi, H., & Sudarto, S. (2025). Efektivitas model pembelajaran kooperatif jigsaw dalam meningkatkan partisipasi siswa kelas IIIA pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila di SD. *Social: Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 5(2), 580. <https://doi.org/10.51878/social.v5i2.5297>
- Simangunsong, M., & Habeahan, S. (2025). Analisis kompetensi profesional guru PPKn dalam mengembangkan civic skill siswa di sekolah UPT SMP N 24 Medan. *Social: Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 5(3), 1169. <https://doi.org/10.51878/social.v5i3.6975>
- Sugiarto, H. (2020). Meningkatkan prestasi belajar Pendidikan Kewarganegaraan dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif jigsaw pada konsep demokrasi. *Journal of Education and Teaching*, 1(1), 21. <https://doi.org/10.24014/jete.v1i1.9202>
- Suhartono, S. (2019). Implementasi nilai musyawarah pada Pancasila melalui metode diskusi kelas dalam pembelajaran PPKn kelas IX di SMP Negeri 3 Krian Sidoarjo. *Didaktis: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan*, 19(3). <https://doi.org/10.30651/didaktis.v19i3.4487>

- Suhartono, S. (2021). Implementasi nilai musyawarah pada Pancasila melalui metode diskusi kelas dalam mata kuliah PKn. *Mendidik: Jurnal Kajian Pendidikan dan Pengajaran*, 7(1), 1. <https://doi.org/10.30653/003.202171.151>
- Susanto, S., Abra, E. H., & Hadiyanto, A. (2025). Dinamika politik identitas dalam Pemilu 2024: Tantangan bagi konsolidasi demokrasi di Indonesia. *Jurnal USM Law Review*, 8(3), 1506. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.12697>
- Tawakal, L., & Purnomo, A. (2025). Analisis tingkat partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran IPS melalui model pembelajaran Teams Games Tournament (TGT) berbantuan media flash card. *Social: Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 5(3), 874. <https://doi.org/10.51878/social.v5i3.6732>
- Toha, M., Wibowo, M. A., & Hamzah, A. (2025). Pengaruh pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan terhadap karakter peserta didik SMP As-Syakur Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang. *Social: Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 5(3), 1240. <https://doi.org/10.51878/social.v5i3.7075>
- Tuhuteru, L. (2023). The role of citizenship education in efforts to instill democratic values. *International Journal of Humanities Education and Social Sciences (IJHESS)*, 2(4). <https://doi.org/10.55227/ijhess.v2i4.361>
- Widiatmaka, P. (2021). Pendidikan kewarganegaraan sebagai ujung tombak pembangunan karakter Pancasila di perguruan tinggi. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 176. <https://doi.org/10.52738/pjk.v1i2.41>
- Yaylacı, Ş., & Beauvais, E. (2017). The role of social group membership on classroom participation. *PS: Political Science & Politics*, 50(2), 559. <https://doi.org/10.1017/s104909651600319x1>
- Yulianie, P., Anjani, M., Dotrimensi, D., & Triyani, T. (2025). Membangun identitas nasional melalui pendidikan kewarganegaraan di SMP Kristen Rehobot Palangka Raya. *Social: Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 5(1), 105. <https://doi.org/10.51878/social.v5i1.4626>
- Yuniarto, B. (2020). Membangun kesadaran demokrasi melalui pendekatan kontekstual pada pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. *Eduksos: Jurnal Pendidikan Sosial & Ekonomi*, 9(1). <https://doi.org/10.24235/edueksos.v9i1.6388>
- Yunus, A., Sukri, S., & Ekawaty, D. (2021). Kebijakan pendidikan dan media sosial sebagai faktor pembentukan preferensi politik pemilih pemula di Kota Makassar. *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*, 65. <https://doi.org/10.31947/jakpp.v7i1.11776>
- Zulfikar, M. F., & Dewi, D. A. (2021). Pentingnya pendidikan kewarganegaraan untuk membangun karakter bangsa. *Jurnal Pekan: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 6(1), 104. <https://doi.org/10.31932/jpk.v6i1.1171>